

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kesesuaian Pelaksanaan Renja dengan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Pengukuran Kinerja merupakan langkah sistematis dan berkelanjutan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk merealisasikan visi dan misi Perangkat Daerah. Selain itu, pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai cara untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda dan Litbang pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengukuran capaian kinerja mengacu pada sasaran strategis serta indikator kinerja yang sudah ditentukan di Bappedalitbang, Yaitu terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja dengan masing-masing target yang harus dicapai setiap tahunnya. Untuk dapat mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut, dilaksanakan dalam wujud program dan kegiatan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Tanah Datar. Pengukuran untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

4.1.1 Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah)

Adapun Pengukuran Target Kinerja Atas Sasaran Tahun 2022-2025 dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Pengukuran Target Kinerja atas sasaran, tahun 2022-2025

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	2022	100%	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%	100%
		2024	100%	100%	100%	100%
		2025	100%	100%	100%	100%
2.	Presentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam usulan RKPD	2022	100%	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%	100%
		2024	100%	100%	100%	100%
		2025	100%	100%	100%	100%

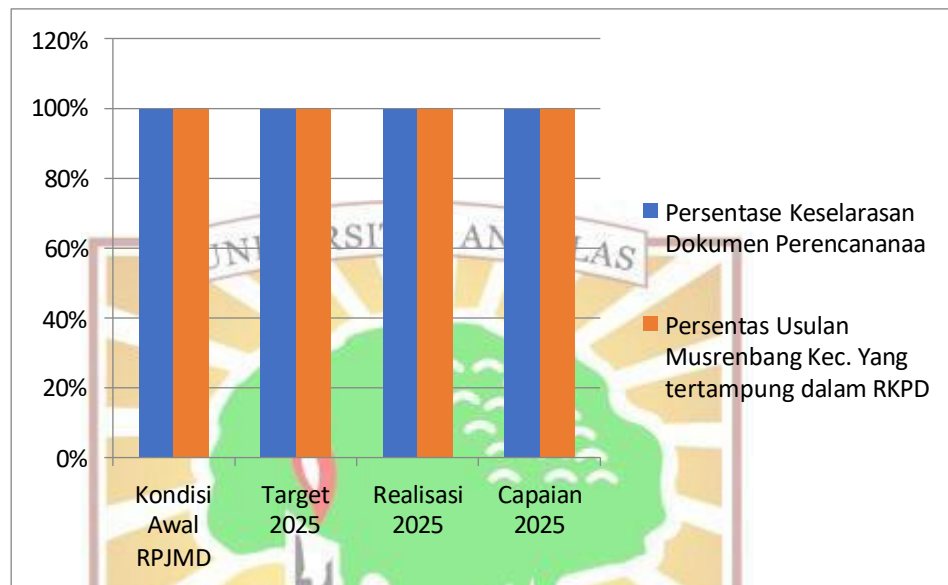
Sumber: Bappedalitbang Tahun 2022-2025

Berdasarkan tabel dan data yang tersedia, dapat diuraikan bahwa tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat diraih melalui beberapa indikator berikut ini :

1. Presentase keselarasan program renstra dengan program RPJMD; dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%. Di tahun 2025, jumlah program yang terdapat dalam RKPD mencapai 241 program, indikator ini dihitung dengan cara membagi jumlah program dalam RPJMD yang telah diakomodir dalam RKPD dengan total program pada RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi sinkronisasi antara dokumen perencanaan, di mana program-program dalam dokumen perencanaan jangka menengah sesuai dengan perencanaan tahunan, dengan demikian semua program yang tercantum dalam dokumen RKPD tahun 2025 sejatinya merupakan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.
2. Presentase keselarasan program Renja dengan RKPD dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%. Indikator ini diukur melalui jumlah program RKPD yang diakomodasi dalam Renja setiap perangkat daerah. Mengacu setiap peraturan Menteri dalam negeri No 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi, Pembangunan daerah serta berbagai tata cara terkait Rancangan Peraturan Daerah dan perubahan-perubahan yang ada, rancangan Renja dan Perangkat Daerah menyediakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten. Oleh karena itu, seluruh program yang terdapat dalam renja perangkat daerah merupakan detail dari RKPD Kabupaten tanah Datar. Salah satu program kegiatan yang mendukung pencapaian

indikator ini adalah Program Perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD.

Gambar 4.1 Target Kinerja Atas Sasaran



Sumber: Bappedalitbang Tahun 2025

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat dijelaskan bahwa target presentase aspirasi masyarakat yang termuat dalam dokumen perencanaan tahunan. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian yang sama. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu elemen krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Aspirasi masyarakat mencerminkan fenomena atau masalah yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat, yang diutarakan dalam bentuk program dan kegiatan. Program-program ini disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat nagari. Aspirasi yang berupa program

kegiatan yang telah disetujui kemudian disampaikan ke Bappeda dan Litbang melalui aplikasi SIPD.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Pengukuran Indikator kinerja

Menentukan indikator kinerja adalah ukuran baik kuantitatif maupun kualitatif yang mencerminkan suatu aktifitas yang telah ditetapkan tercapai. Indikator kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Proses penetapan indikator kinerja diikuti dengan pengukuran besaran bagi masing-masing jenis indikator yang telah ditentukan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk kegiatan. Proses pemanfaatan kinerja yang ada. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan, serta adanya peningkatan atau penurunan pada kinerja dan solusi alternatif yang telah di upayakan.

Langkah – langkah yang dilakukan Bappedalitbang dalam mencapai kinerja sesuai sasaran peningkatan atau penurunan pada kinerja keselarasan meliputi:

- a) Pelaksanaan keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/241/ORG-2024 mengenai petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di lingkungan daerah.

- b) Pelaksanaan Pengendalian dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup verifikasi Rencana Strategis OPD, verifikasi kesesuaian RKPD, dan verifikasi kesesuaian RPJMD Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2025-2029.
- c) Meningkatkan koordinasi dengan APIP untuk menindaklanjuti hasil reviu dokumen perencanaan pada setiap tahap. meskipun pencapaian kinerja terhadap sasaran telah sesuai dengan yang di targetkan, tetap saja terdapat beberapa kendala mencapainya, di antaranya:
- Perencanaan kinerja belum diikuti oleh pemahaman dan komitmen serupa dari semua aparatur di berbagai tingkat jabatan. Peningkatan kapasitas serta komitmen Kepala Daerah.
 - Proses verifikasi indikator kinerja dalam dokumen perencanaan membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan sumber daya yang cukup besar.
 - Diterbitkannya keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi Validitas, Inventarisasi Pembaruan Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar agar kinerja dalam peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan berlanjut adalah:

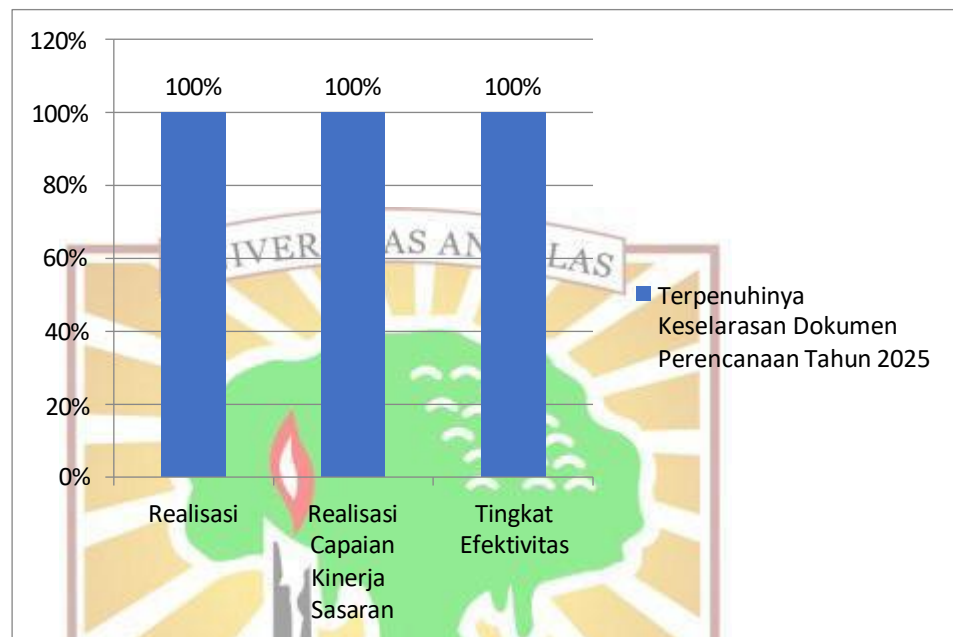
- a. Melanjutkan Satuan Pelaksanaan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi dalam menyusun perencanaan untuk memastikan konsistensi di setiap tahap mulai dari perencanaan tahun 2023.
- c. Menginternalisasi penyusunan perencanaan kinerja kepada seluruh level aparatur dalam perangkat daerah.
- d. Melakukan pemetaan ulang Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub, Kegiatan, dalam dokumen perencanaan yang ada dengan nomenklatur yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas program terhadap capaian sasaran meningkatnya kualitas capaian perencanaan 2022-2025

Tahun	Realisasi	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2022	100%	100%	100%	Terpenuhinya keselarasan Dokumen Perencanaan
2023	100%	100%	100%	Terpenuhinya keselarasan Dokumen Perencanaan
2024	100%	100%	100%	Terpenuhinya keselarasan Dokumen Perencanaan
2025	100%	100%	100%	Terpenuhinya keselarasan Dokumen Perencanaan

Sumber: LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar

**Gambar 4.2 Tingkat Efektivitas Program Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Capaian Perencanaan Tahun 2025**



Sumber: LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan mencapai 100% persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (100 persen) terhadap realisasi anggaran program (100 persen) sebagaimana tertera pada Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 4.3 Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Tahun 2025**

Tahun	Pagu Belanja Sasaran (RP)	Realisasi Belanja Sasaran (RP)	Presentase %	Efisiensi %
2022	362.159.300	-	-	-
2023	549.881.465	476.254.164	87.70	7,0
2024	362,720,725	342,783,645	94,50	5,5
2025	270.155.780	242.315.190	89,69	7,9

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar

Ditinjau dari sisi efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 100 persen dan realisasi keuangan sebesar 89.69% persen, tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan mencapai 7.9% persen.

Tabel 4.4 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2025

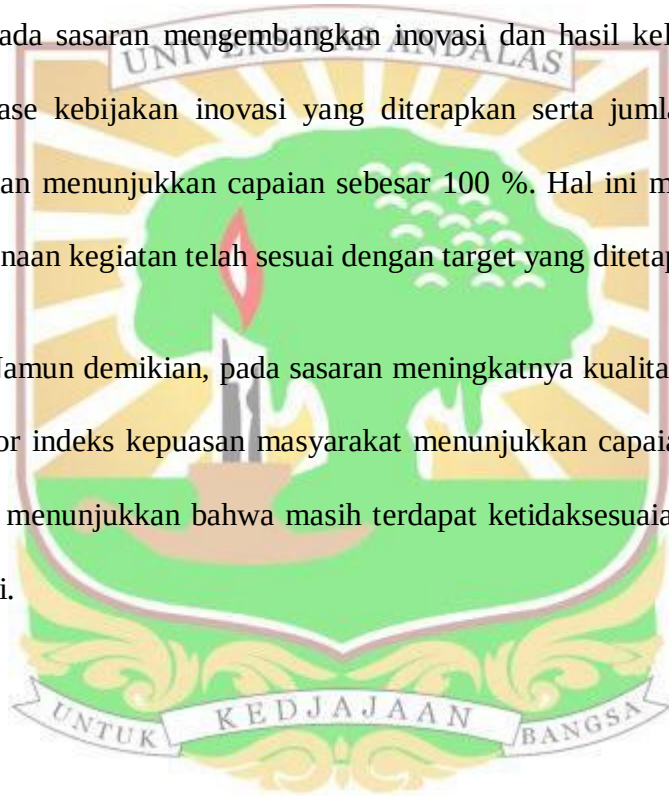
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Meningkatkan Kualitas dan Capaian Perencanaan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
Mengembangkan Inovasi dan Hasil Kelitbangan	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	80%	80%	100%
	Jumlah Penelitian yang dilakukan	3	3	100%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (73,50)		

Sumber: BappedaLitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 4.4 sebagian besar sasaran strategis telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja secara umum telah sesuai dengan sasaran. Pada sasaran meningkatkan kualitas dan sasaran dan capaian perencanaan, indikator keselarasan dokumen perencanaan menunjukkan capaian 100 %. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antar dokumen perencanaan yang disusun.

Pada sasaran mengembangkan inovasi dan hasil kelitbangan, indikator presentase kebijakan inovasi yang diterapkan serta jumlah penelitian yang dilakukan menunjukkan capaian sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Namun demikian, pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator indeks kepuasan masyarakat menunjukkan capaian sebesar 90,45%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi.



4.1.2 Sasaran 2 (Mengembangkan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Adapun Tabel dari Hasil Penelitian dan Inovasi Daerah Tahun 2022-2025 ialah:

Tabel 4.5 Hasil Penelitian dan Inovasi Daerah Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Penelitian yang dikembangkan	2022	90%	100%	100%
		2023	10%	100%	100%
		2024	20%	100%	100%
		2025	100%	100%	100%
2	Jumlah Penelitian yang dilakukan	2022	3	3	100%
		2023	3	3	100%
		2024	3	3	100%
		2025	3	3	100%

Sumber: LKjIP Bappedalitbang Tahun 2025

Pelaksanaan Inovasi setiap perangkat daerah menghasilkan inovasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Inovasi Yang Sudah Terlaksana Pada Perangkat Daerah 2025

No	OPD	Jenis Inovasi
1.	Inspektorat	Klinik Konsultasi Keuangan Nagari
		SPP KADES BERDASI (Strategi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari Berbasis Pendampingan Terintegrasi)
2.	Bappedalitbang	TANDA PRENEUR (Tanah Datar <i>Entrepreneur</i>)
		DORADASI (Mendorong Perangkat Daerah Berinovasi)
3.	Bappenda	BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari)
4.	Dinas Kesehatan	SIDURI (Sistem Informasi Data Pustu Dan Poskesri)
5.	Dinas Pu, Penataan Ruang dan Pertanahan	DIRUANGDATA (Data dan Informasi Keruangan Tanah Datar)
6.	Dinas Perkim LH	Satu Nagari Satu Bank Sampah
	Dinas Sosial, PPPA	SIPENA TERPADU (Sistem Informasi Perlindungan Anak Terpadu)
7.	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	SUKSES TERPANA (SD WAN untuk Akses SIAK Terpusat Nagari)
		ANDU KOBARAN RINDU (Penerbitan Dokumen Kependudukan Korban Bencana dan Kebakaran Ringankan Duka)
		BAJOJO (Buat Akta dari Jorong Ke Jorong)
		MUDA SAKA UTAMI (Mutakhirkan Data Status Kawin Untuk Tanah Datar Madani)
8.	Dinas Perhubungan	PAKET SMART PAPA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Tanah Datar Selesaikan Masalah Anti Ribet Dan Terpadu Bagi Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Batusangkar)
9.	Dinas Penanaman Modal Satu Pintu	PETIK BUAH KECAPI (Pelayanan Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha untuk Kejar Capaian Realisasi Investasi)
10.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	LAMANG DURIAN (Layanan Imigrasi Agam Datang Dukung Pemerintah Tanah Datar)

No	OPD	Jenis Inovasi
11.	Dinas Pertanian	GEBETAN MANIS (Gerakan Bengkel Alat Mesin Pertanian dan Mekanisasi Pertanian Gratis)
12.	Satpol PP Damkar	SILAPAK POLDAM (Sistem layanan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
13.	Rumah Sakit Umum Daerah	HANJARI (Penyampaian Keluhan Di Ujung Jari)
		SIPANDEKA HARIS (Sistem Penyuluhan dengan Tatap Muka pada Hari Kamis)
14.	Kecamatan Tanjung Baru	PELARI NABALAM (Pelayanan Satu Hari Di Nagari Barulak Dan Tanjung Alam)
15.	Kecamatan Lintau Buo Utara	LAPAS (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Bantuan Sosial)

Sumber: Bappedalitbang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel dan data Hasil Penelitian dan Inovasi yang sudah terlaksana yang didapatkan dari LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2025, seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian 100% yang berarti pelaksanaan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang turut mendukung pencapaian kinerja tersebut. Namun demikian, perlu di kaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa indikator yang telah digunakan mencerminkan kondisi kinerja secara objektif.

4.1.3 Sasaran 3 Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja daerah

(Perencanaan dan Pengukuran Kinerja)

Adapun Tabel dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah Tahun 2022-2025 ialah:

**Tabel 4.7 Akuntabilitas Kinerja Daerah Bappedalitbang
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2025**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	2022	BB	BB	BB
	2023	BB(75,00)	BB(72,95)	92,2
	2024	BB(74,50)	BB(73,50)	98,65
	2025	BB(73,50)	-	-

Sumber: Bappedalitbang Tahun 2025

Indikator nilai akuntabilitas kinerja daerah merupakan indikator wajib pada Bappedalitbang dimana target yang ditetapkan adalah BB (73,50). Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Pada Tahun 2025 anggaran belanja Bappedalitbang dalam rangka pencapaian target kinerja sebesar Rp. 7,405,791,330 dengan realisasi sebesar Rp. 6,755,954,279 dan capaian realisasi anggaran 91,23%. Sementara itu, nilai akuntabilitas kinerja Bappedalitbang Tahun 2025 belum dapat disajikan karena masih dalam tahap penilaian oleh Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar.

Berikut ini capaian program/kegiatan berdasarkan urusan kewenangan Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan sebanyak 4 dokumen.

2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia berupa dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia sebanyak 2 Dokumen.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian sebanyak 3 Dokumen.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

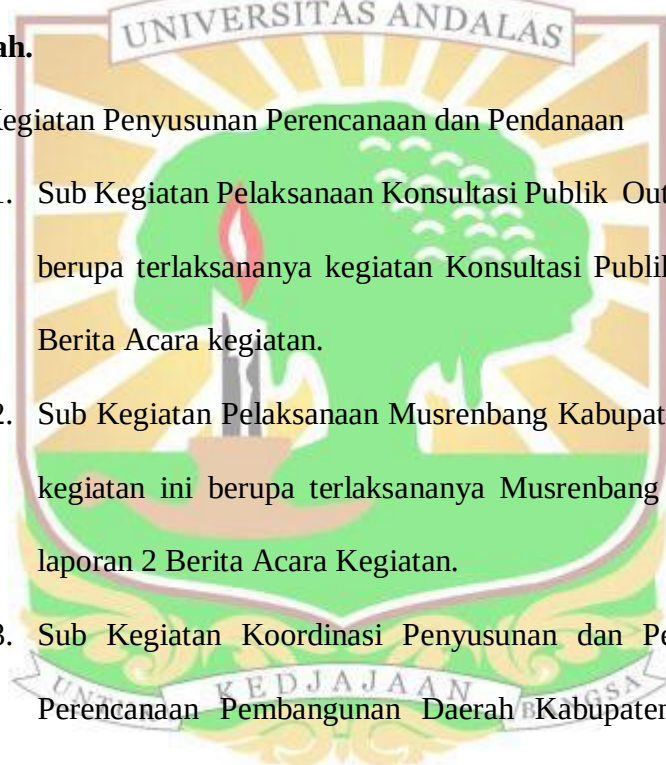
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan sebanyak 3 Laporan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan Konsultasi Publik dengan laporan 2 Berita Acara kegiatan.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya Musrenbang Kabupaten dengan laporan 2 Berita Acara Kegiatan.
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Output sub kegiatan ini berupa 4 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah



1. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Output sub kegiatan ini berupa tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 Dokumen.
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebanyak 4 Laporan Monev.

3. Program Penelitian dan Pembangunan Daerah

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Output sub kegiatan ini berupa 1 Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Output sub kegiatan ini berupa terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi pengembangan inovasi dan teknologi sebanyak 2 Dokumen.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Output sub kegiatan ini berupa dokumen DPA, DPPA Perubahan, LKjIP, LKPJ, Renja Perubahan, Renja Tahun 2026 dan 1 (satu) jasa lainnya.

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Output sub kegiatan ini berupa gaji dan tunjangan 41 ASN.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Output sub kegiatan ini berupa dokumen Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Output sub kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan bagi 4 (empat) ASN.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Output sub kegiatan ini berupa terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan tersedianya alat tulis kantor sebanyak 38 jenis.

2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Output sub kegiatan ini berupa terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan tersedianya barang cetak dan fotocopy selama 1 Tahun.

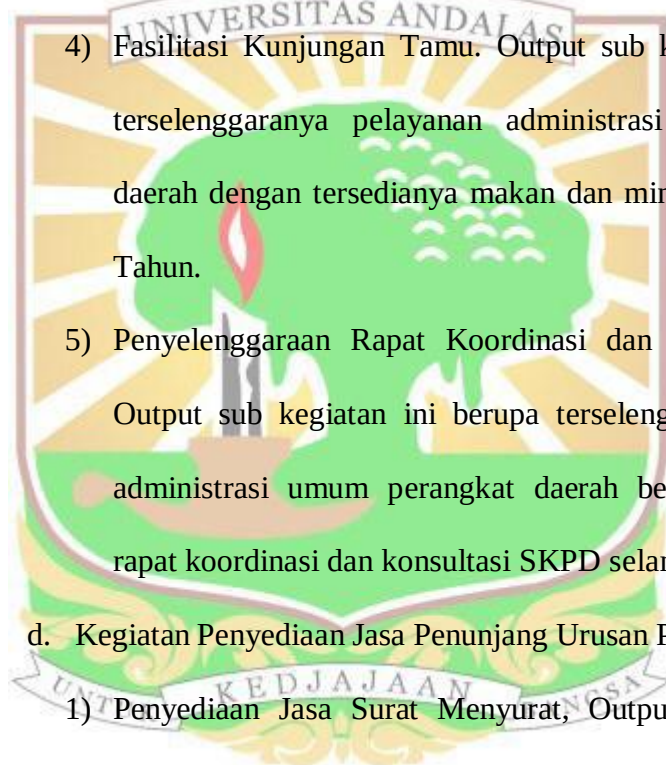
- 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor. Output sub kegiatan ini berupa terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan tersedianya komponen listrik kantor sebanyak 2 Jenis.

- 4) Fasilitas Kunjungan Tamu. Output sub kegiatan ini berupa terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan tersedianya makan dan minum tamu selama 1 Tahun.

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output sub kegiatan ini berupa terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah berupa terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 1 Tahun.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Output sub kegiatan ini berupa tersedianya surat menyurat sebanyak 150 Lembar.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik. Output sub kegiatan ini berupa tersedianya pembayaran rekening listrik, air dan internet selama 12 Bulan.



3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Output sub kegiatan ini berupa tersedianya tenaga kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor selama 12 bulan dan pembayaran honor Tenaga Jasa Lainnya 1 orang.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub kegiatan ini berupa tersedianya AC sebanyak 4 unit yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Output sub kegiatan ini berupa tersedianya pembayaran pajak kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit dan roda 2 sebanyak 11 unit, bahan bakar, suku cadang, serta pembayaran honor Jasa Tenaga Lainnya 1 orang.

2) Pemeliharaan Mebel. Output sub kegiatan ini berupa tersedianya pemeliharaan peralatan mebel sebanyak 1 Jenis.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub kegiatan ini berupa tersedianya pemeliharaan, peralatan dan mesin kantor sebanyak 12 unit.

4) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Output sub kegiatan ini berupa tersedianya pembayaran Tenaga Jasa

Lainnya 2 orang serta pemeliharaan Gedung kantor.

4.1.4 Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Adapun Tabel Kualitas pelayanan Publik Bappedalitbang Tahun 2022-2025 ialah:

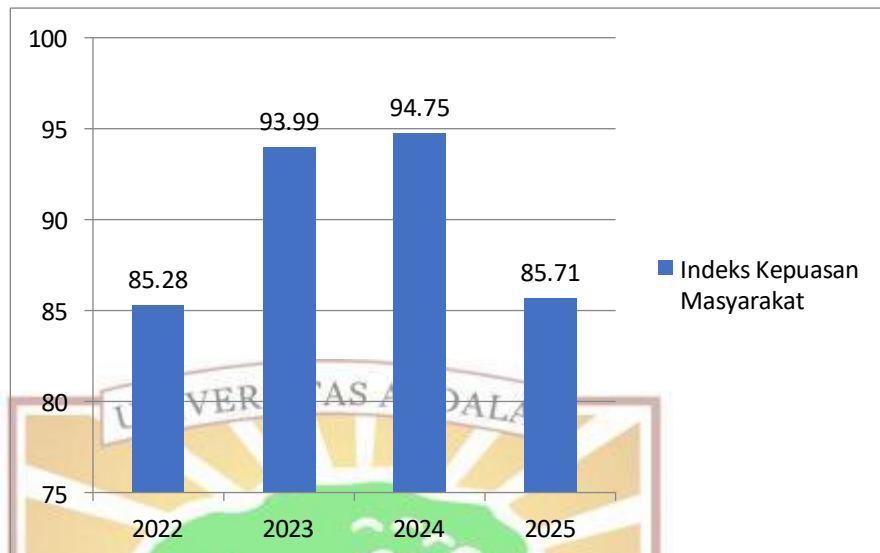
**Tabel 4.8 Kualitas Pelayanan Publik Bappedalitbang
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2025**

Indikator Kinerja	Tahun	Target %	Realisasi %	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat	2022	96,00	85,28 (B)	88,83
	2023	86,86	93,99 (SB)	108,1
	2024	95,00	94,75 (SB)	99,7
	2025	94,75	85,71 (B)	90,45

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Gambar 4.3 Kualitas Pelayanan Publik

Bappedalitbang Tahun 2022-2025



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator wajib pada Bappedalitbang dimana target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 94,75 dan dapat realisasi sebesar 85,71 dengan capaian sebesar 90,45%. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Berdasarkan kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, nilai 85,71 berada pada rentang 76,61–88,30 dengan mutu pelayanan B (Baik). Adapun kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari nilai 88,31–100 dengan mutu

pelayanan A (Sangat Baik), nilai 76,61–88,30 dengan mutu pelayanan B (Baik), nilai 65,00–76,60 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik), dan nilai 25,00–64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik).Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah.
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah.
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu :

1. Standar Pelayanan yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan, memaklumkan standar pelayanan, memiliki SOP bagi pelaksana standar pelayanan.
2. Budaya Pelayanan Prima bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman.
3. Pelayanan publik lebih humanis dimana dapat ditempatkan semacam duta pelayanan dengan pakaian non seragam bagi pelayanan publik sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan tidak canggung.

4. Sistem Penerimaan Tamu yang nyaman serta Penempatan layanan publik yang mudah dilihat publik.
5. Menyediakan ruangan laktasi/menyusui.
6. Menyediakan ruangan khusus merokok (*smoking room*).
7. Menyediakan fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas (orang berkebutuhan khusus), lansia dan ibu hamil.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sasaran strategis Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, secara umum pelaksanaan Renja telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Meskipun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target secara optimal, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 90,45%, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan pelayanan publik.

4.1.5 Faktor yang mempengaruhi kesesuaian pelaksanaan Renja

Dalam Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar terdapat faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran Faktor pendukungnya antara lain adanya sistem perencanaan, terintegrasi melalui pemanfaatan sistem aplikasi Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD), pelaksanaan musyawarah pembangunan (Musrenbang), serta koordinasi antar perangkat daerah yang berjalan dengan baik.

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi antara lain belum meratanya pemahaman dan komitmen aparatur terhadap perencanaan kinerja di setiap level jabatan, kebutuhan sumber daya yang besar dalam proses verifikasi indikator kinerja, serta adanya perubahan regulasi terkait nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dilakukan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dan sinergi melalui forum-forum resmi seperti rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan, guna memastikan keterpaduan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dioptimalkan untuk mendukung ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan transparansi, serta mempermudah proses pengendalian dan evaluasi, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.